

LAMPIRAN 1 PERHITUNGAN POTENSI PAJAK HIBURAN

Billiard

Q2	Nama	Jumlah Meja	Tariff/jam		Rata-rata sewa per hari Tahun 2013		Rata-rata sewa Tahun 2014		Rata-rata sewa Tahun 2015	
			Hari Biasa	Weekend	Hari Biasa	Weekend	Hari Biasa	Weekend	Hari Biasa	Weekend
ID	13	13 Meja	24000	13 jam	15 jam	15 jam	15 jam	15 jam	15 jam	15 jam
IP & Cafe	14	14 Meja	24000	15 jam	15 jam	20 jam	15 jam	15 jam	20 jam	15 jam
Sumber	DISPENDA	10 Meja	24000	12 jam	12 jam	15 jam	15 jam	15 jam	15 jam	15 jam

Billard

Tahun	Nama	Jumlah Meja	Tariff per Jam		Rata-rata sewa per hari Tahun 2013		Rata-rata sewa per hari Tahun 2014		Rata-rata sewa per hari Tahun 2015	
			Hari Biasa	Weekend	Hari Biasa	Weekend	Hari Biasa	Weekend		
2013	A	3	24000	14 Rp	1.008.000	14 Rp	867.920.000	15%	15%	55.188.000,00
2014	B	3	24000	12 Rp	864.000	12 Rp	815.360.000	15%	15%	47.504.000,00
2015	C	3	24000	15 Rp	1.080.000	15 Rp	984.200.000	15%	15%	59.130.000,00

Jumlah Tempat Billiard Terdaftar BP2T

Tarif rata-rata sewa per jam

Rata-rata sewa perhari

Omsat Sehari

Omsat Sebulan

Potensi Pajak

Bojoring

ID	Nama	Jumlah Lina	Tariff per Jam		Rata-rata sewa per hari Tahun 2013		Rata-rata sewa per hari Tahun 2014		Rata-rata sewa per hari Tahun 2015	
			Hari Biasa	Weekend	Hari Biasa	Weekend	Hari Biasa	Weekend		
Sumber	DISPENDA	B	20000	29000	34	70	32	64	25	40

Jumlah tempat bowling terdaftar di BP2T

Tarif rata-rata sewa per jam

Rata-rata sewa per hari

Omsat Sehari

Omsat Sebulan

Potensi Pajak

Bojoring

Tahun	Nama	Jumlah Lina	Tariff		Rata-rata sewa per hari Tahun 2013		Rata-rata sewa per hari Tahun 2014		Rata-rata sewa per hari Tahun 2015	
			Hari Biasa	Weekend	Hari Biasa	Weekend	Hari Biasa	Weekend		
2013	A	1	21000	44 Rp	924.000	44 Rp	337.240.000	15%	15%	50.889.000,00
2014	B	1	21000	41 Rp	861.000	41 Rp	314.365.000	15%	15%	47.139.750,00
2015	C	1	21000	29 Rp	609.000	29 Rp	222.85.000	15%	15%	33.342.750,00

Jumlah tempat karaoke Terdaftar BP2T

Tarif rata-rata sewa per jam

Omsat Sehari

Omsat Sebulan

Potensi Pajak

Kiraha

STO	Nama	Jumlah Room	Tariff		Rata-rata sewa per hari Tahun 2013		Rata-rata sewa per hari Tahun 2014		Rata-rata sewa per hari Tahun 2015	
			Hari Biasa	Weekend	Hari Biasa	Weekend	Hari Biasa	Weekend		
DIME	60 room	30000	40000	12 jam	15 jam	20 jam	15 jam	15 jam	15 jam	15 jam
YUNA	4 room	40000	40000	10 jam	15 jam	15 jam	15 jam	15 jam	15 jam	15 jam
Sumber	DISPENDA	8 room	33000	45000	15 jam	25 jam	16 jam	14 jam	12 jam	15 jam

Jumlah tempat karaoke Terdaftar BP2T

Tarif rata-rata sewa per jam

Omsat Sehari

Omsat Sebulan

Potensi Pajak

Kiraha

Tahun	Nama	Jumlah Room	Tariff		Rata-rata sewa per hari Tahun 2013		Rata-rata sewa per hari Tahun 2014		Rata-rata sewa per hari Tahun 2015	
			Hari Biasa	Weekend	Hari Biasa	Weekend	Hari Biasa	Weekend		
2013	A	28	36000	31 Rp	10.080.000	31 Rp	6.996.480.000	20%	20%	1.398.096.000,00
2014	B	36	36000	31 Rp	12.960.000	31 Rp	6.996.480.000	20%	20%	1.398.096.000,00
2015	C	35	36000	34 Rp	12.600.000	34 Rp	15.619.620.000	20%	20%	3.123.924.000,00

Jumlah tempat karaoke Terdaftar BP2T

Tarif rata-rata sewa per jam

Omsat Sehari

Omsat Sebulan

Potensi Pajak

TAMAN RECREASI

OP	Nama	Tariff Harga Tiket Masuk	Pengunjung Tahun 2013		Pengunjung Tahun 2014		Pengunjung Tahun 2015	
			Hari Biasa	Weekend	Hari Biasa	Weekend	Hari Biasa	Weekend
ID	14000	15 orang	75 orang	100 orang	100 orang	12 orang	75 orang	75 orang
PRI SWP	35000	40 orang	65 orang	45 orang	95 orang	48 orang	85 orang	85 orang
Sumber	DISPENDA	40000	10 orang	40 orang	20 orang	30 orang	87 orang	87 orang

Rata-rata tarif harga tiket masuk

Rata-rata pengunjung perhari

Omsat Sehari

Omsat Sebulan

MAMA	Tarif		Jumlah Studio atau Kursi	Jenis Film Import		Pemutaran Film		Penghasilan film impor/ Kori yang telah 2000 gandum film impor/ Kori yang telah	
	Harat Bina	Weekend		Harat Bina	Weekend	Harat Bina	Weekend	Harat Bina	Weekend
D	35000	40000	1	222	134	172	137	172	137
M	25000	30000	2	273	98	140	88	144	93
S	40000	50000	2	44	27	38	24	38	30

Sumber: Dipenda

Tahun	A	B	C	D (hari)	E (orang)	F	G	Z
2013	4	36000	2	17	17	17	6.371.240.000,00	15%
2014	4	36000	2	17	17	17	5.981.840.000,00	10%
2015	4	36000	2	21	17	21	6.622.560.000,00	10%
2013	4	36000	3	17	17	17	15.137.280.000,00	20%
2014	4	36000	3	17	17	17	14.664.240.000,00	20%
2015	4	36000	3	17	17	17	15.137.280.000,00	20%

Jumlah tempat bioskop terdistribusi di BPT

Harat Tiket Bioskop

Jenis Film Lokal Yang di Putar

Jumlah pemutaran film lokal/impor perhari

Pemutaran Film Lokal/Impor Perhari

Onset Sesiun

Onset Sesiun

Tarif paket bioskop lokal JON

Pemutaran Film Hiburan Bioskop Lokal

Sumber: Dipenda

Tahun	A	B	C	D (hari)	E (orang)	F	G	Z
2013	4	36000	2	17	17	17	6.371.240.000,00	15%
2014	4	36000	2	17	17	17	5.981.840.000,00	10%
2015	4	36000	2	21	17	21	6.622.560.000,00	10%
2013	4	36000	3	17	17	17	15.137.280.000,00	20%
2014	4	36000	3	17	17	17	14.664.240.000,00	20%
2015	4	36000	3	17	17	17	15.137.280.000,00	20%

Jumlah tempat bioskop terdistribusi di BPT

Harat Tiket Bioskop

Jenis Film Lokal Yang di Putar

Jumlah pemutaran film lokal/impor perhari

Pemutaran Film Lokal/Impor Perhari

Onset Sesiun

Onset Sesiun

Tarif paket bioskop lokal JON

Pemutaran Film Hiburan Bioskop Lokal

Sumber: Dipenda

Tahun	A	B	C	D (hari)	E (orang)	F	G	Z
2013	4	36000	2	17	17	17	6.371.240.000,00	15%
2014	4	36000	2	17	17	17	5.981.840.000,00	10%
2015	4	36000	2	21	17	21	6.622.560.000,00	10%
2013	4	36000	3	17	17	17	15.137.280.000,00	20%
2014	4	36000	3	17	17	17	14.664.240.000,00	20%
2015	4	36000	3	17	17	17	15.137.280.000,00	20%

Jumlah tempat bioskop terdistribusi di BPT

Harat Tiket Bioskop

Jenis Film Lokal Yang di Putar

Jumlah pemutaran film lokal/impor perhari

Pemutaran Film Lokal/Impor Perhari

Onset Sesiun

Onset Sesiun

Tarif paket bioskop lokal JON

Pemutaran Film Hiburan Bioskop Lokal

Sumber: Dipenda

Tahun	A	B	C	D (hari)	E (orang)	F	G	Z
2013	4	36000	2	17	17	17	6.371.240.000,00	15%
2014	4	36000	2	17	17	17	5.981.840.000,00	10%
2015	4	36000	2	21	17	21	6.622.560.000,00	10%
2013	4	36000	3	17	17	17	15.137.280.000,00	20%
2014	4	36000	3	17	17	17	14.664.240.000,00	20%
2015	4	36000	3	17	17	17	15.137.280.000,00	20%

Jumlah tempat bioskop terdistribusi di BPT

Harat Tiket Bioskop

Jenis Film Lokal Yang di Putar

Jumlah pemutaran film lokal/impor perhari

Pemutaran Film Lokal/Impor Perhari

Onset Sesiun

Onset Sesiun

Tarif paket bioskop lokal JON

Pemutaran Film Hiburan Bioskop Lokal

Sumber: Dipenda

Tahun	A	B	C	D (hari)	E (orang)	F	G	Z
2013	4	36000	2	17	17	17	6.371.240.000,00	15%
2014	4	36000	2	17	17	17	5.981.840.000,00	10%
2015	4	36000	2	21	17	21	6.622.560.000,00	10%
2013	4	36000	3	17	17	17	15.137.280.000,00	20%
2014	4	36000	3	17	17	17	14.664.240.000,00	20%
2015	4	36000	3	17	17	17	15.137.280.000,00	20%

Jumlah tempat bioskop terdistribusi di BPT

Harat Tiket Bioskop

Jenis Film Lokal Yang di Putar

Jumlah pemutaran film lokal/impor perhari

Pemutaran Film Lokal/Impor Perhari

Onset Sesiun

Onset Sesiun

Tarif paket bioskop lokal JON

Pemutaran Film Hiburan Bioskop Lokal

Sumber: Dipenda

Tahun	A	B	C	D (hari)	E (orang)	F	G	Z
2013	4	36000	2	17	17	17	6.371.240.000,00	15%
2014	4	36000	2	17	17	17	5.981.840.000,00	10%
2015	4	36000	2	21	17	21	6.622.560.000,00	10%
2013	4	36000	3	17	17	17	15.137.280.000,00	20%
2014	4	36000	3	17	17	17	14.664.240.000,00	20%
2015	4	36000	3	17	17	17	15.137.280.000,00	20%

Jumlah tempat bioskop terdistribusi di BPT

Harat Tiket Bioskop

Jenis Film Lokal Yang di Putar

Jumlah pemutaran film lokal/impor perhari

Pemutaran Film Lokal/Impor Perhari

Onset Sesiun

Onset Sesiun

Tarif paket bioskop lokal JON

Pemutaran Film Hiburan Bioskop Lokal

Sumber: Dipenda

Tahun	A	B	C	D (hari)	E (orang)	F	G	Z
2013	4	36000	2	17	17	17	6.371.240.000,00	15%
2014	4	36000	2	17	17	17	5.981.840.000,00	10%
2015	4	36000	2	21	17	21	6.622.560.000,00	10%
2013	4	36000	3	17	17	17	15.137.280.000,00	20%
2014	4	36000	3	17	17	17	14.664.240.000,00	20%
2015	4	36000	3	17	17	17	15.137.280.000,00	20%

Jumlah tempat bioskop terdistribusi di BPT

Harat Tiket Bioskop

Jenis Film Lokal Yang di Putar

Jumlah pemutaran film lokal/impor perhari

Pemutaran Film Lokal/Impor Perhari

Onset Sesiun

Onset Sesiun

Tarif paket bioskop lokal JON

Pemutaran Film Hiburan Bioskop Lokal

LAMPIRAN 2 LAPORAN TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH

KODE REKREING	URAIAN	TARGET TAHUN 2013 ST/H PAK	REALISASI PENERIMAAN				KURANG/LEBIH	% S/D BULAN
			S/D BULAN LALU Rp.	DESEMBER 2013 Rp.	S/D DESEMBER 2013 Rp.	KURANG/LEBIH		
4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	210.287.899,778,18	211.787.763,894,12	26.711.984,267,45	238.499.748,161,57	(28.211.848,383,99)	113,42	
4 1 1 01	Pajak Hotel	11.115.346.405,15	12.075.983.762,25	1.858.816.887,62	13.934.800.659,87	(2.819.454,254,72)	125,37	
4 1 1 01 03	Hotel Bintang 4	4.627.318.708,14	6.008.088.492,95	1.010.372.213,82	7.018.461.706,77	(2.391.142.998,63)	151,67	
4 1 1 01 04	Hotel Bintang 3	2.087.462.054,74	1.887.120.879,00	318.100.305,00	2.205.221.184,00	(117.759.129,26)	105,64	
4 1 1 01 05	Hotel Bintang 2	724.720.585,56	1.214.756.577,00	191.248.203,00	1.406.004.780,00	(681.884.194,44)	194,01	
4 1 1 01 07	Hotel Melati	3.409.076.743,01	2.652.032.736,00	302.515.567,00	2.954.548.303,00	454.528.440,01	86,67	
4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	64.469.009,15	59.300.000,00	8.543.000,00	67.843.000,00	(3.373.990,85)	105,23	
4 1 1 01 13	Wisma Perwistata	207.299.304,55	254.685.077,30	28.036.608,80	282.721.686,10	(80.422.381,55)	139,75	
4 1 1 02	Pajak Restoran	21.437.718.910,80	23.007.208.264,03	2.472.463.470,28	25.479.671.734,31	(4.041.952.823,51)	118,85	
4 1 1 02 01	Restoran	13.427.742.684,99	15.400.161.843,83	1.632.832.308,78	17.032.994.152,61	(3.605.251.467,62)	126,85	
4 1 1 02 02	Rumah Makan	7.406.257.662,17	6.753.703.777,40	736.923.195,50	7.490.626.972,90	(84.869.310,73)	101,14	
4 1 1 02 03	Cafe	603.718.563,64	853.342.642,80	102.707.966,00	956.050.608,80	(352.332.045,16)	158,36	
4 1 1 03	Pajak Hiburan	3.451.736.261,10	3.730.492.710,50	353.029.466,20	4.083.522.176,70	(631.785.915,60)	118,30	
4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop	1.990.616.301,78	2.504.301.600,00	217.783.500,00	2.722.085.100,00	(731.468.798,22)	136,75	
4 1 1 03 02	Pageblaran Kesenian/Musik/Tran/Buana/dll	229.885.634,99	84.936.125,00	19.899.600,00	104.835.725,00	115.049.909,99	45,60	
4 1 1 03 05	Pameran	93.196.879,05	6.233.250,00	-	6.233.250,00	86.963.629,05	6,69	
4 1 1 03 07	Karaoke	443.202.935,92	654.463.542,00	68.619.525,20	723.083.067,20	(279.880.131,28)	163,15	
4 1 1 03 10	Pernikahan Billiard	76.283.371,37	36.361.725,00	3.348.300,00	39.710.025,00	36.573.346,37	52,06	
4 1 1 03 12	Pernikahan Bowling	52.466.391,17	37.562.025,00	3.420.300,00	40.982.325,00	11.484.066,17	78,11	
4 1 1 03 15	Pernikahan Kelempasan	326.534.250,30	254.808.375,50	25.923.975,00	280.732.350,50	45.801.899,80	85,97	
4 1 1 03 16	Panti Jijah/Keleksi	35.207.709,86	68.096.118,00	8.142.416,00	76.238.534,00	(41.030.824,14)	216,54	
4 1 1 03 19	Pertandingan Olah Raga	82.841.670,27	15.448.000,00	-	15.448.000,00	67.393.670,27	18,65	
4 1 1 03 20	Taman Rekreasi	121.501.116,39	68.281.950,00	5.891.850,00	74.173.800,00	47.327.316,39	61,05	
4 1 1 04	Pajak Reklame	9.037.246.651,74	9.738.503.465,75	977.707.624,00	10.716.211.079,75	(1.678.964.428,01)	118,58	
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Billboard/Wilka/Videotron/Megatron	5.951.352.992,84	6.465.839.413,25	596.976.080,00	7.062.315.493,25	(1.104.962.500,41)	118,55	
4 1 1 04 02	Reklame Kain/Spanduk	2.974.157.873,09	3.152.945.324,50	379.805.550,00	3.532.750.874,50	(558.593.001,41)	118,78	
4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker/Poster	5.422.347,99	9.366.880,00	-	9.366.880,00	(3.944.532,01)	172,75	
4 1 1 04 04	Reklame Selebaran	12.652.145,30	2.472.000,00	17.640,00	2.489.640,00	10.167.505,30	19,88	
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	87.661.292,52	107.879.848,00	1.408.344,00	109.288.192,00	(21.626.899,48)	124,67	
4 1 1 05	Pajak Penerangan jalan	31.585.084.634,92	30.816.735.887,70	3.180.172.999,20	33.996.908.886,90	(2.411.824.251,98)	107,64	
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan jalan PLN	31.497.453.032,44	30.702.048.100,00	3.168.646.465,00	33.870.696.565,00	(2.373.243.532,56)	107,53	
4 1 1 05 02	Pajak Penerangan jalan Non PLN	87.631.602,48	114.687.787,70	11.524.534,20	126.212.321,90	(38.580.719,42)	144,03	

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013 S/D DESEMBER 2013

1	2	3	4	5	6	7	8
4 1 1 07	Pajak Parkir	1.693.911.094,77	1.760.498.218,00	179.369.515,00	1.939.867.733,00	(245.956.638,23)	114,52
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	1.693.911.094,77	1.760.498.218,00	179.369.515,00	1.939.867.733,00	(245.956.638,23)	114,52
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	641.130.420,40	617.425.639,10	77.322.246,10	694.747.885,20	(53.617.464,80)	108,36
4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	641.130.420,40	617.425.639,10	77.322.246,10	694.747.885,20	(53.617.464,80)	108,36
4 1 1 11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	85.673.803.416,00	83.260.036.707,75	16.550.090.010,05	99.810.126.717,80	(14.136.323.301,80)	116,50
4 1 1 11 01	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	85.673.803.416,00	83.260.036.707,75	16.550.090.010,05	99.810.126.717,80	(14.136.323.301,80)	116,50
4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	45.651.921.983,30	46.780.879.239,04	1.063.012.049,00	47.843.891.288,04	(2.191.969.304,74)	104,80
4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	45.651.921.983,30	46.780.879.239,04	1.063.012.049,00	47.843.891.288,04	(2.191.969.304,74)	104,80
4 1 4	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH		778.946.859,10	114.719.273,26	893.666.132,36	(893.666.132,36)	-
4 1 4 07	PENDAPATAN DENDA PAJAK		190.430.254,39	7.146.784,03	197.577.038,42	(197.577.038,42)	-
4 1 4 07 01	Pendapatan Denda Pajak Hotel		16.897.527,68	3.394.851,56	20.292.379,24	(20.292.379,24)	-
4 1 4 07 02	Pendapatan Denda Pajak Restoran		17.071.115,81	2.405.643,42	19.476.759,23	(19.476.759,23)	-
4 1 4 07 03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan		144.495.047,71	368.167,54	144.863.215,25	(144.863.215,25)	-
4 1 4 07 04	Pendapatan Denda Pajak Reklame		-	-	-	-	-
4 1 4 07 05	Pendapatan Denda Pajak Non Penerimaan jalan		259.715,18	7.895,81	267.610,99	(267.610,99)	-
4 1 4 07 07	Pendapatan Denda Pajak Parkir		8.412.351,00	592.200,00	9.004.551,00	(9.004.551,00)	-
4 1 4 07 08	Pendapatan Denda Air Tanah		3.294.497,01	378.025,70	3.672.522,71	(3.672.522,71)	-
4 1 4 02	JASA GIRO		31.724.274,21	51.183.546,98	82.907.821,19	(82.907.821,19)	-
4 1 4 02 02	Jasa Giro Pemegang Kas		3.802.477,55	568.840,06	4.371.317,61	(4.371.317,61)	-
4 1 4 02 02	Jasa Giro Pemegang Kas Atas Jambong		27.921.796,66	50.614.706,92	78.536.503,58	(78.536.503,58)	-
4 1 4 09	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		556.792.330,50	56.388.942,25	613.181.272,75	(613.181.272,75)	-
4 1 4 09 02	Hasil Eksekusi jaminan atas pembongkaran reklame		556.792.330,50	56.388.942,25	613.181.272,75	(613.181.272,75)	-

Malang, Januari 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

Ir. H. ADE HERAWANTO, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19681017 199203 1 006

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014 S/D DESEMBER 2014

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2014 SETELAH PAJAK	REALISASI PENERIMAAN				KURANG/LEBIH	% S/D BULAN
			S/D BULAN LALU Rp.	DESEMBER 2014 Rp.	S/D DESEMBER 2014 Rp.			
1	2	3	5	6	7	8	9	
4 1 1	HASIL PAJAK DAERAH	280.000.000.000,00	243.290.305.958,76	35.594.883.590,11	278.885.189.548,87	(18.885.189.548,87)	107,26	
4 1 1 01	Pajak Hotel	17.169.997.868,68	21.153.759.347,87	3.915.298.215,00	25.069.057.562,87	(7.889.119.694,19)	146,01	
4 1 1 01 03	Hotel Bintang 4	7.170.962.019,26	10.629.574.443,00	1.257.190.172,00	11.881.764.615,00	(4.710.802.595,74)	165,69	
4 1 1 01 04	Hotel Bintang 3	2.764.793.249,20	4.062.503.109,60	1.816.227.963,00	5.878.731.072,60	(3.113.937.823,40)	212,63	
4 1 1 01 05	Hotel Bintang 2	1.893.186.849,00	2.121.922.436,87	244.762.278,00	2.366.684.714,87	(473.497.865,87)	125,01	
4 1 1 01 07	Hotel Melati	4.431.799.765,91	3.247.966.124,50	433.302.332,00	3.683.268.456,50	(748.531.909,41)	83,11	
4 1 1 01 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos	448.636.145,83	611.316.650,00	122.104.688,00	733.421.338,00	(284.785.192,17)	163,48	
4 1 1 01 13	Wisma Pariwisata	460.559.839,48	480.476.583,90	44.710.782,00	525.187.365,90	(64.627.526,42)	114,03	
4 1 1 02	Pajak Restoran	28.476.534.584,04	27.569.811.930,72	2.903.623.554,18	30.473.435.484,90	(1.996.900.900,86)	107,01	
4 1 1 02 01	Restoran	17.455.946.391,70	15.640.225.364,22	1.596.330.892,00	17.236.556.256,22	(219.390.135,48)	98,74	
4 1 1 02 02	Rumah Makan	9.793.632.713,40	10.302.082.194,70	1.155.234.739,18	11.457.316.933,88	(1.663.684.220,88)	116,99	
4 1 1 02 03	Cafe	1.226.955.478,94	1.627.504.371,80	152.057.923,00	1.779.562.294,80	(552.606.815,86)	145,04	
4 1 1 03	Pajak Hiburan	4.542.595.922,35	4.612.827.402,92	527.894.732,49	5.140.722.135,41	(598.126.213,05)	113,17	
4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop	2.444.047.833,33	2.570.823.000,00	248.441.000,00	2.819.264.000,00	(375.216.166,67)	115,35	
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana/dll ✓	275.862.761,99	148.178.750,00	56.495.775,00	204.674.525,00	(71.188.236,99)	74,19	
4 1 1 03 05	Pameran ✓	111.836.254,85	159.966.000,00	159.966.000,00	159.966.000,00	(48.129.745,15)	143,04	
4 1 1 03 07	Karaoke	863.744.140,68	992.909.850,22	146.803.164,64	1.139.713.014,86	(275.968.874,18)	131,95	
4 1 1 03 10	Pernikahan Bilyard	91.940.045,67	46.835.950,00	1.849.500,00	48.685.450,00	(43.254.595,67)	52,95	
4 1 1 03 12	Pernikahan Bowling	62.559.669,37	37.273.425,00	3.398.550,00	40.671.975,00	(21.887.694,37)	65,01	
4 1 1 03 15	Pernikahan Ketangkasan	391.841.100,40	410.185.844,70	32.797.022,00	442.982.866,70	(51.141.766,30)	113,05	
4 1 1 03 16	Panti Pijar/Refleksi	55.552.772,00	74.868.733,00	6.969.140,00	81.837.873,00	(26.285.101,00)	147,32	
4 1 1 03 19	Pertandingan Olah Raga ✓	99.410.004,37	101.943.750,00	25.167.280,85	127.111.030,85	(27.701.026,48)	127,87	
4 1 1 03 20	Taman Rekreasi	145.801.339,69	69.842.100,00	5.973.300,00	75.815.400,00	(69.899.999,69)	52,00	
4 1 1 04	Pajak Reklame	15.640.433.942,58	17.536.939.752,52	1.853.078.315,00	19.390.018.667,52	(3.749.584.724,94)	123,97	
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Billboard/Milka/Videotron/Neogatron	11.015.129.453,00	13.748.202.360,52	1.564.144.265,00	15.312.346.625,52	(4.297.217.172,52)	139,01	
4 1 1 04 02	Reklame Kalin	4.461.236.809,59	3.598.900.664,00	287.989.650,00	3.886.890.314,00	(574.346.495,59)	87,13	
4 1 1 04 03	Reklame Meleka/Stiker/Poster	8.133.521,99	20.930.400,00	-	20.930.400,00	(12.796.878,01)	257,34	
4 1 1 04 04	Reklame Selebaran	18.978.218,00	4.200.000,00	-	4.200.000,00	(14.778.218,00)	22,13	
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	136.955.940,00	164.706.328,00	945.000,00	165.651.328,00	(28.695.988,00)	120,95	
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	37.602.101.561,92	36.162.239.269,93	3.779.720.289,34	39.941.959.559,27	(2.339.857.997,35)	106,22	
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	37.496.943.638,94	36.005.091.765,00	3.763.686.128,00	39.768.777.893,00	(2.271.834.254,06)	106,06	
4 1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	105.157.922,98	157.147.504,93	16.034.161,34	173.181.666,27	(68.023.743,29)	164,69	

1	2	3	5	6	7	8	9
4 1 1 07	Pajak Parkir	1.947.997.758,99	2.393.886.891,00	249.642.919,00	2.643.529.810,00	(695.532.051,01)	135,70
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	1.947.997.758,99	2.393.886.891,00	249.642.919,00	2.643.529.810,00	(695.532.051,01)	135,70
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	701.130.420,40	752.987.849,54	66.232.114,90	819.219.964,44	(118.089.544,04)	116,84
4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	701.130.420,40	752.987.849,54	66.232.114,90	819.219.964,44	(118.089.544,04)	116,84
4 1 1 11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	100.050.000.000,75	81.698.555.320,74	19.827.176.673,20	101.525.731.993,94	(1.475.731.993,19)	101,47
4 1 1 11 01	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	100.050.000.000,75	81.698.555.320,74	19.827.176.673,20	101.525.731.993,94	(1.475.731.993,19)	101,47
4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	53.869.267.940,29	51.409.298.193,52	2.472.216.177,00	53.881.514.370,52	(12.246.430,23)	100,02
4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	53.869.267.940,29	51.409.298.193,52	2.472.216.177,00	53.881.514.370,52	(12.246.430,23)	100,02
4 1 4	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH		623.768.346,22	40.827.327,17	664.595.673,39	(664.595.673,39)	
4 1 4 07	PENDAPATAN DENDA PAJAK		125.271.967,57	21.072.617,91	146.344.585,48	(146.344.585,48)	
4 1 4 07 01	Pendapatan Denda Pajak Hotel		31.565.694,08	8.963.770,26	40.529.464,34	(40.529.464,34)	
4 1 4 07 02	Pendapatan Denda Pajak Restoran		62.151.724,91	10.008.053,40	72.159.778,31	(72.159.778,31)	
4 1 4 07 03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan		10.286.663,30	569.122,96	10.855.786,26	(10.855.786,26)	
4 1 4 07 04	Pendapatan Denda Pajak Reklame		9.428.930,62	-	9.428.930,62	(9.428.930,62)	
4 1 4 07 05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan		152.037,34	4.081,69	156.119,03	(156.119,03)	
4 1 4 07 07	Pendapatan Denda Pajak Parkir		7.120.355,92	1.261.668,00	8.382.023,92	(8.382.023,92)	
4 1 4 07 08	Pendapatan Denda Air Tanah		4.566.561,40	265.921,60	4.832.483,00	(4.832.483,00)	
4 1 4 02	JASA GIRO		769.066,63	27.166.406,47	27.935.473,10	(27.935.473,10)	
4 1 4 02 01	Jasa Giro Pemegang Kas		769.066,63	1.537.756,68	2.306.823,31	(2.306.823,31)	
4 1 4 02 02	Jasa Giro Pemegang Kas Atas lambung			25.628.649,79	25.628.649,79	(25.628.649,79)	
4 1 4 09	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		498.996.378,65	19.754.709,26	518.251.087,91	(518.251.087,91)	
4 1 4 09 02	Hasil Eksekusi Jaminan atas pembongkaran reklame		498.996.378,65	19.754.709,26	518.251.087,91	(518.251.087,91)	
4 1 4 10	Pendapatan dari Pengembalian lainnya	10.194.557,00			10.194.557,00	(10.194.557,00)	
4 1 4 10 07	Pendapatan dari Pengembalian lainnya	10.194.557,00			10.194.557,00	(10.194.557,00)	

Ket :

KEPALA DINAS PENYAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

Malang, JANUARI 2015

J. H. ADE HERAWANTO, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19681017 199203 1 006

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PALAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015 S/D DESEMBER 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2015 SETELAH PAK	REALISASI PENERIMAAN				KURANG/LEBIH	% S/D BULAN
			S/D BULAN TAJU Rp.	DESEMBER 2015 Rp.	S/D DESEMBER 2015 Rp.			
1	2	3	5	6	7	8	9	
4 1 1	HASIL PALAK DAERAH	272.000.000,00	287.854.994,07	28.959.973,67	316.814.967,74	(44.814.967,74)	116,48	
4 1 1 01	Pajak Hotel	22.131.094.351,27	28.530.589.667,88	3.297.918.860,55	31.828.508.228,43	(9.697.413.877,16)	143,82	
4 1 1 01 03	Hotel Bintang 4	10.941.242.840,40	12.767.834.442,73	1.469.498.360,00	14.237.332.802,73	(3.296.089.962,33)	230,13	
4 1 1 01 04	Hotel Bintang 3	4.124.300.717,60	8.071.210.942,90	873.294.468,00	8.944.505.410,90	(4.820.204.693,30)	116,87	
4 1 1 01 05	Hotel Bintang 2	2.114.446.447,87	2.409.802.508,34	380.430.558,20	2.790.233.066,54	(675.386.618,67)	131,96	
4 1 1 01 07	Hotel Melati	2.422.140.732,50	2.748.412.612,60	325.766.640,85	3.074.179.253,45	(652.938.520,95)	126,92	
4 1 1 01 13	Wisma Pariwisata	506.042.592,90	158.747.049,30	18.801.868,00	1.775.548.917,30	328.493.675,60	35,09	
4 1 1 01 15	Guest House	1.022.921.020,00	790.522.029,01	75.609.916,00	866.131.945,01	156.789.074,99	84,67	
4 1 1 01 16	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/ Rumah Kos	1.000.000.000,00	1.584.059.783,00	154.517.049,50	1.738.576.832,50	(738.576.832,50)	173,86	
4 1 1 02	Pajak Restoran	28.476.534.584,04	34.849.735.016,17	4.221.585.168,05	39.071.320.184,22	(10.594.785.600,18)	137,21	
4 1 1 02 01	Restoran	16.037.187.155,54	16.660.144.150,61	1.874.494.612,33	18.534.638.762,94	(2.497.451.607,40)	115,57	
4 1 1 02 02	Rumah Makan	10.801.475.122,70	15.542.047.868,49	2.108.284.403,72	17.650.332.272,21	(6.848.851.149,51)	163,41	
4 1 1 02 03	Cafe	1.637.872.305,80	2.647.542.997,07	238.806.152,00	2.886.349.149,07	(1.248.476.843,27)	176,23	
4 1 1 03	Pajak Hiburan	4.943.004.465,24	5.535.771.550,74	495.442.242,20	6.031.213.792,94	(1.088.209.327,70)	122,02	
4 1 1 03 01	Tontonan Film/Bioskop	2.563.395.500,00	2.923.781.000,00	290.248.500,00	3.214.029.500,00	(650.634.000,00)	125,38	
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana/dll	414.881.073,17	546.927.900,00	25.750.500,00	572.678.400,00	(157.797.526,83)	138,03	
4 1 1 03 05	Pameran	158.466.000,00	160.734.000,00	562.500,00	161.296.500,00	(2.830.500,00)	101,79	
4 1 1 03 07	Karaoke	1.073.028.972,00	1.064.551.643,34	91.659.037,20	1.156.210.680,54	(83.181.708,54)	107,75	
4 1 1 03 10	Pernikahan Bilyard	45.008.700,00	46.586.775,00	1.887.450,00	48.474.225,00	(3.465.525,00)	107,70	
4 1 1 03 12	Pernikahan Bowling	40.367.525,00	36.505.650,00	3.358.350,00	39.864.000,00	509.525,00	98,75	
4 1 1 03 15	Pernikahan Kejangkasan	404.536.793,70	542.535.737,40	46.853.215,00	589.388.952,40	(184.852.156,70)	145,69	
4 1 1 03 16	Panti Pikat/Refleksi	75.421.047,00	77.691.295,00	10.224.115,00	87.915.410,00	(12.494.368,00)	116,57	
4 1 1 03 19	Pertandingan Olah Raga	99.410.004,37	58.998.900,00	16.508.625,00	75.507.525,00	23.902.479,37	75,96	
4 1 1 03 20	Taman Rekreasi	68.488.850,00	77.458.650,00	8.389.950,00	85.848.600,00	(17.359.750,00)	125,35	
4 1 1 04	Pajak Reklame	18.676.522.723,99	18.579.061.366,32	977.981.654,00	19.557.043.020,32	(880.520.296,31)	104,71	
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Billboard/Milka/Videootron/Megatron	14.506.359.280,00	15.694.512.710,82	613.991.726,00	16.308.504.436,82	(1.802.145.156,82)	112,42	
4 1 1 04 02	Reklame Kain	4.006.095.764,00	2.556.932.692,50	359.777.160,00	2.916.709.852,50	1.089.385.911,50	72,81	
4 1 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker/Poster	8.133.521,99	14.175.000,00	-	14.175.000,00	(6.041.478,01)	174,28	
4 1 1 04 04	Reklame Sebaran	18.978.218,00	240.000,00	-	240.000,00	18.738.218,00	1,26	
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	136.955.940,00	313.200.963,00	4.212.768,00	317.413.731,00	(180.457.791,00)	231,76	
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	40.602.101.561,92	41.722.976.969,76	4.083.501.161,42	45.805.478.131,18	(5.203.376.569,26)	112,82	
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PUN	40.496.943.638,94	41.539.693.857,00	4.063.653.510,00	45.603.347.367,00	(5.106.403.728,06)	112,61	
4 1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Non PUN	105.157.922,98	183.283.112,76	18.847.651,42	202.130.764,18	(96.972.841,20)	192,22	

1	2	3	5	6	7	8	9
4 1 1 07	Pajak Parkir	2.501.998,407,60	3.316.126.371,20	346.839.457,70	3.662.965.828,90	(1.160.967.421,30)	146,40
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	2.501.998,407,60	3.316.126.371,20	346.839.457,70	3.662.965.828,90	(1.160.967.421,30)	146,40
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	749.475,964,90	709.541,546,66	67.981,533,88	777,523,080,54	(28.047,115,64)	103,74
4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	749.475,964,90	709.541,546,66	67.981,533,88	777,523,080,54	(28.047,115,64)	103,74
4 1 1 11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	100.050.000,000,75	97.520.959,863,73	13.945,165,887,50	111,466,125,751,23	(11.416,125,750,48)	111,41
4 1 1 11 01	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	100.050.000,000,75	97.520.959,863,73	13.945,165,887,50	111,466,125,751,23	(11.416,125,750,48)	111,41
4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	53.869,267,940,29	57.090,232,019,00	1.524,557,707,00	58,614,789,726,00	(4.745,521,785,71)	108,81
4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB)	53.869,267,940,29	57.090,232,019,00	1.524,557,707,00	58,614,789,726,00	(4.745,521,785,71)	108,81
4 1 4	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH		2.885,717,929,41	357,679,390,32	3.243,397,319,73	(3.243,397,319,73)	
4 1 4 07	PENDAPATAN DENDA PALAK		2.387,137,631,15	335,796,361,25	2,722,933,992,40	(2,722,933,992,40)	
4 1 4 07 01	Pendapatan Denda Pajak Hotel		37,974,792,73	6,732,394,84	44,707,187,57	(44,707,187,57)	
4 1 4 07 02	Pendapatan Denda Pajak Restoran		58,822,023,51	10,417,248,23	69,239,271,74	(69,239,271,74)	
4 1 4 07 03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan		7,701,624,29	47,648,34	7,749,272,63	(7,749,272,63)	
4 1 4 07 04	Pendapatan Denda Pajak Reklame		3,682,661,00	-	3,682,661,00	(3,682,661,00)	
4 1 4 07 05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan		962,554,39	1,458,415,62	2,420,970,01	(2,420,970,01)	
4 1 4 07 07	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan		11,670,914,40	812,620,21	12,483,534,61	(12,483,534,61)	
4 1 4 07 08	Pendapatan Denda Pajak Parkir		15,107,567,83	2,086,248,01	17,193,815,84	(17,193,815,84)	
4 1 4 02 02	JASA GIRO		2,251,215,493,00	314,241,786,00	2,565,457,279,00	(2,565,457,279,00)	
4 1 4 02 02 02	Jasa Giro Pemegang Kas		-	6,787,164,40	6,787,164,40	(6,787,164,40)	
4 1 4 02 02 02 02	Jasa Giro Pemegang Kas Atas Jambong		-	6,787,164,40	6,787,164,40	(6,787,164,40)	
4 1 4 09	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		498,580,298,26	15,095,864,67	513,676,162,93	(513,676,162,93)	
4 1 4 09 02	Hasil Eksekusi Jaminan atas pembongkaran reklame		498,580,298,26	15,095,864,67	513,676,162,93	(513,676,162,93)	
4 1 4 10	Pendapatan dari Pengembalian lainnya		-	-	-	-	
4 1 4 10 07	Pendapatan dari Pengembalian lainnya		-	-	-	-	

Malang, JANUARI 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA MALANG,

Ir. H. ADE HERAWANTO, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19681017 199203 1 006

LA Light Music Project	Graha Cakrawala	HUT 10 th Distro Pastirik	Jl. Soekarno Hatta Paradisa Garden	Duet 55th You&You	Hall Swarna Paksi Kartika Graha
Makalula	Taman Krida Budaya	KANALOP	Universitas Brawijaya	Event All Spaly to Anniversary	Graha Cakrawala UM
Musik Kayu Tangan	Graha Cakrawala	J-Rock "Sringgal"	Lapangan Rampal	event music	Gedung Pramuka
Pemilihan Indonesian Model	Convention Hall Kartika Graha	JRT 48	Graha Cakrawala UM	Festival Operet	Jl. Caroli Sukun Malang
Pentas Lomba-lumba	Lap. Rampal	KDS DISPLAY PLAYPASS COMPETITION	Graha Cakrawala UM	FIA Night Run	FK UB
Pestogila	Graha Cakrawala	Kentungan A-Operet	Graha Cakrawala UM	FiestaCultural Night	Graha Cakrawala UM
Sudrow VS Jamrud	Lap. Rampal	KIDS Fiesta	SKODAM Malang	Flashback in Malang	Gedung Pramuka
SMANSA	Samantha Krida	Lomba Dance Idol Beat	Balai Merdeka Univ. Merdeka Malang	GoodBless 2015	Kartika Graha
The NEVASCIA	Jl. Tugu Utara No. 1 Malang	Malam Tawa	Graha Cakrawala UM	Hill of Justice	FIB UB
VokalSymphoni	Balduri Sepah Ballroom	MIPA golden Festival	Gedung Galayana Malang	Isihanti Tanisliminshou	Taman Krida Budaya
		Musik karya Anak Negeri	LAP RRI Malang	Japanese Festival	Balai Merdeka Ummer
		Pesta Seni pertunjukan kota dingin	Graha Cakrawala UM	Kita Project Exklusiv concert	Graha Cakrawala UM
		Psychopation #2	Graha Cakrawala UM	Konser musik	permatia Jingga pool
		Reuni Dewa	Graha Cakrawala UM	konser musik harmonika	lapangan rampal
		Stand Up comedy Jatin Slow	Graha Cakrawala UM	Konser slank	Graha Cakrawala UM
		treemny fest	Graha Cakrawala UM	Launching Album	Mall Jinyoyo city
		festival band laya tangan		Loca Loco	Parkir Lap. Galayana
				Melani Puncak Permaseta	Lap. Trunojoyo Malang
				Malang chocolate festival	Taman Krida Budaya
				malang colour run 2015	Taman Krida Budaya
				malang dohdon	Graha Cakrawala UM
				Malang party #2	Graha Cakrawala UM
				Malau Wilson	MA UB
				New Year Eve Party	Regenda Hotel Malang
				Opera 2015	Acara Musik Mahabali Café
				Pembelian Baju kebaya 2015	Hotel Kartika Graha Malang
				Pencils Kentroong & Operet	Graha Cakrawala UM
				Pentas Musik	Graha Cakrawala UM
				Pentas seni smkn 10 malang	Jl. Dasau Granti
				Pesta akvrat ngalam	Taman Krida Budaya
				PT. Sabari Jayakarya	Jl. Kapten Hanun Kabir
				Reactor Nuclear	GoodBless Café
				Semarak Mahasiswa Sosial	Graha Cakrawala UM
				Sweet and sweat	Lap. Parkir Galayana Malang
				The Novasca	Jl. Tugu
				UKM Seni Theatistis	lapangan mini soccer polinema
				Youth Colour Festival	lapangan rampal
Jumlah		Jumlah	26	Jumlah	51

Bowling		Tahun 2014		Tahun 2015	
Nama	Alamat	Nama	Alamat	Nama	Alamat
Bowling Istana Dieng	Istana Dieng	Bowling Istana Dieng	Istana Dieng	Bowling Istana Dieng	Istana Dieng
Jumlah	1	Jumlah	1	Jumlah	1

Tempat Fitness & Gym		2013		2014		2015	
Nama	Alamat	Nama	Alamat	Nama	Alamat	Nama	Alamat
My Gym Fitness	Jl. Galunggung 82						
Fitness dan Gym Araya Club House	Jl. Blimbing Indah Megah No. 2	Fitness dan Gym Araya Club House	Jl. Blimbing Indah Megah No. 2	Fitness dan Gym Araya Club House	Jl. Blimbing Indah Megah No. 2	Fitness dan Gym Araya Club House	Jl. Blimbing Indah Megah No. 2
Safa Fitness Centre	Jl. Simpang Winiwardhana 01 No 7E	Safa Fitness Centre	Jl. Simpang Winiwardhana 01 No 7E	Safa Fitness Centre	Jl. Simpang Winiwardhana 01 No 7E	Safa Fitness Centre	Jl. Simpang Winiwardhana 01 No 7E
Atlas Fitness Centre	Jl. Raya Istana Dieng III	Atlas Fitness Centre	Jl. Raya Istana Dieng III	Atlas Fitness Centre	Jl. Raya Istana Dieng III	Atlas Fitness Centre	Jl. Raya Istana Dieng III
Challina Gymnastic & Fitness Centre	Jl. Malajpahit 1 - K	Challina Gymnastic & Fitness Centre	Jl. Malajpahit 1 - K	Challina Gymnastic & Fitness Centre	Jl. Malajpahit 1 - K	Challina Gymnastic & Fitness Centre	Jl. Malajpahit 1 - K
Jaco Fitness & Health	Jl. Veteran 2	Jaco Fitness & Health	Jl. Veteran 2	Jaco Fitness & Health	Jl. Veteran 2	Jaco Fitness & Health	Jl. Veteran 2
Xtreme Gym	Jl. Sukarno Hatta Kaw 12	Xtreme Gym	Jl. Sukarno Hatta Kaw 12	Xtreme Gym	Jl. Sukarno Hatta Kaw 12	Xtreme Gym	Jl. Sukarno Hatta Kaw 12
Max GYM	Ruko Naga C6 & C7	Max GYM	Ruko Naga C6 & C7	Max GYM	Ruko Naga C6 & C7	Max GYM	Ruko Naga C6 & C7
Maestro Gym Centre	Jl. Danau Toba F 17-18	Maestro Gym Centre	Jl. Danau Toba F 17-18	Maestro Gym Centre	Jl. Danau Toba F 17-18	Maestro Gym Centre	Jl. Danau Toba F 17-18
Flash gym	Jl. Raya Langgar 2 F	Flash Gym	Jl. Raya Langgar 2 F	Flash Gym	Jl. Raya Langgar 2 F	Flash Gym	Jl. Raya Langgar 2 F
Calosa Fitness Centre	Jl. Bondowoso 14						
Body gym	Jl. Danau Jongge 17/027						
Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	12

Jumlah	Pusat Gaya Centro Olahraga	Jl. Erci, Honeksuheri No. 86 Jl. 831 Agri Salim No. 20 B	Gemas Karohar	Jl. 831 Agri Salim No. 20 B	36	Jumlah	35
--------	-------------------------------	---	---------------	-----------------------------	----	--------	----

2013		2014		2015	
Nama	Alamat	Nama	Alamat	Nama	Alamat
Bilyard 02	Jalan Sukarno Hatta Malang	Bilyard 02	Jalan Sukarno Hatta Malang	Bilyard 02	Jalan Sukarno Hatta Malang
Bilyard Istana Dieng	Komplek Istana Dieng Malang	Bilyard Istana Dieng	Jl. Istana Dieng Malang	Bilyard 02 - 1	Jalan Sukarno Hatta Malang
Exotic Pool & Lounge	Jalan Galunggung 82 Lt. 2	MIRAGE	Jl. Sekeloa Harta Ageri Malang	Bilyard Istana Dieng	Komplek Istana Dieng Malang
Jumlah	3	Jumlah	3	Jumlah	3

2013		2014		2015	
Nama	Alamat	Nama	Alamat	Nama	Alamat
Dhogoada Massage	Jalan Raya Tlogomas	Dhogoada Massage	Jalan Raya Tlogomas	Panti Pijat Anugrah	Jalan L.A. Sucipto Malang
Panti Pijat Anugrah	Jalan L.A. Sucipto Malang	Panti Pijat Anugrah	Jalan L.A. Sucipto Malang	Panti Pijat Anugrah 2	Jalan L.A. Sucipto Malang
Panti Pijat Shanty	Jalan L.A. Sucipto Malang	Panti Pijat Shanty	Jalan L.A. Sucipto Malang	Panti Pijat Shanty	Jalan Prastawa Malang
Panti Pijat Wira Jasa Mulya	Jalan Pastimura Malang	Panti Pijat Wira Jasa Mulya	Jalan Pastimura Malang	Spa Dhogoada	Jalan Raya Tlogomas
Spa Hotel Regent's	Jalan J.A. Suprapto 12-16 Malang	Spa Hotel Regent's	Jalan J.A. Suprapto 12-16 Malang	Spa Hotel Savana	Jalan L.A. Sucipto No. 12-16 Malang
Spa Hotel Tugu	Jl. Tugu No.1 Malang	Spa Hotel Tugu	Jalan Tugu No.1 Malang	Spa Hotel Tugu	Jalan Kawi No. 24 Buko 13-17 Komplek MOG
GYRA BUGAR	Jl. BRIGEL S. BADI NO. 13 MALANG	GYRA BUGAR	Jl. ISTANA DIENG BAYA I / NO. 9 MALANG	GYRA BUGAR	Jl. ISTANA DIENG BAYA I / NO. 9 MALANG
PACIFIC	Jl. MANIRJAU NO. 21 MALANG	PACIFIC	Jl. BRIGEL S. BADI NO. 13 MALANG	PACIFIC	Jl. BRIGEL S. BADI NO. 13 MALANG
GYRA AYU	Jl. BROMO NO. 7 MALANG	GYRA AYU	Jl. MANIRJAU NO. 21 MALANG	GYRA AYU	Jl. BROMO NO. 7 MALANG
MARTHA TILIAAR SALON & DAY SPA	Jl. SEMERU NO. 48 MALANG	MARTHA TILIAAR SALON & DAY SPA	Jl. SEMERU NO. 48 MALANG	MARTHA TILIAAR SALON & DAY SPA	Jl. SEMERU NO. 48 MALANG
PT. KEZIA PADMA SUCI	Jl. REFUNDING NO. 42 MALANG	PT. KEZIA PADMA SUCI	Jl. SEMERU NO. 48 MALANG	PT. KEZIA PADMA SUCI	Jl. SEMERU NO. 48 MALANG
PANTI PIJAT "CV. MAMA AGENG"	Jl. KAPUTING NO. 42 MALANG	PANTI PIJAT "CV. MAMA AGENG"	Jl. REFUNDING NO. 42 MALANG	PANTI PIJAT "CV. MAMA AGENG"	Jl. REFUNDING NO. 42 MALANG
DYOSGE	Jl. KARYA TILUAR NO. 31 MALANG	DYOSGE	Jl. KARYA TILUAR NO. 31 MALANG	DYOSGE	Jl. KARYA TILUAR NO. 31 MALANG
SINGHASARI	Jl. KAWI NO.24 (BUKOS-17) KOMPLEK MOG MALANG	SINGHASARI	Jl. KAWI NO.24 (BUKOS-17) KOMPLEK MOG MALANG	SINGHASARI	Jl. KAWI NO.24 (BUKOS-17) KOMPLEK MOG MALANG
Jumlah	14	Jumlah	17	Jumlah	19

2013		2014		2015	
Nama	Alamat	Nama	Alamat	Nama	Alamat
SWIMMING POOL PERMATA JINGGA	PERUM PERMATA JINGGA III RT.03/RW.06 KOTA MALANG	SWIMMING POOL PERMATA JINGGA	PERUM PERMATA JINGGA III RT.03/RW.06 KOTA MALANG	SWIMMING POOL PERMATA JINGGA	PERUM PERMATA JINGGA III RT.03/RW.06 KOTA MALANG
ISTANA DIENG	Jl. ISTANA DIENG BAYA III MALANG (CLUB HOUSE)	ISTANA DIENG	Jl. ISTANA DIENG BAYA III MALANG (CLUB HOUSE)	ISTANA DIENG	Jl. ISTANA DIENG BAYA III MALANG (CLUB HOUSE)
PERMATA JINGGA	PERUM PERMATA JINGGA III RT.03 RW.06 MALANG	PERMATA JINGGA	PERUM PERMATA JINGGA III RT.03 RW.06 MALANG	PERMATA JINGGA	PERUM PERMATA JINGGA III RT.03 RW.06 MALANG
De Rumah Play Ground	De Rumah Play Ground	De Rumah Play Ground	De Rumah Play Ground	De Rumah Play Ground	De Rumah Play Ground
Taman Rekreasi "Tlogo Mas Permai"	Taman Rekreasi "Tlogo Mas Permai"	Taman Rekreasi "Tlogo Mas Permai"	Taman Rekreasi "Tlogo Mas Permai"	Taman Rekreasi "Tlogo Mas Permai"	Taman Rekreasi "Tlogo Mas Permai"
Jumlah	5	Jumlah	5	Jumlah	5

2013		2014		2015	
Nama	Alamat	Nama	Alamat	Nama	Alamat
My Gym Fitness	Jl. Galunggung 82	My Gym Fitness	Jl. Galunggung 82	My Gym Fitness	Jl. Galunggung 82
Fitness dan Gym Araya Club House	Jl. Blimbing Indah Megah No. 2	Fitness dan Gym Araya Club House	Jl. Blimbing Indah Megah No. 2	Fitness dan Gym Araya Club House	Jl. Blimbing Indah Megah No. 2
Safa Fitness Centre	Jl. Sempang Wisnuwardhana 01 No 7E	Safa Fitness Centre	Jl. Sempang Wisnuwardhana 01 No 7E	Safa Fitness Centre	Jl. Sempang Wisnuwardhana 01 No 7E
Chatalina Gymnastic & Fitness C	Jl. Raya Istana Dieng III	Chatalina Gymnastic & Fitness Centre	Jl. Raya Istana Dieng III	Chatalina Gymnastic & Fitness Centre	Jl. Raya Istana Dieng III
Jaco Fitness & Health	Jl. Malapahit 1 - K	Jaco Fitness & Health	Jl. Malapahit 1 - K	Jaco Fitness & Health	Jl. Malapahit 1 - K
Xtreme Gym	Jl. Veteran 2	Xtreme Gym	Jl. Veteran 2	Xtreme Gym	Jl. Veteran 2
Max GYM	Jl. Sukarno Hatta Kav 12	Max GYM	Jl. Sukarno Hatta Kav 12	Max GYM	Jl. Sukarno Hatta Kav 12
Mastro Gym Centre	Ruko Niaga C6 & C7	Mastro Gym Centre	Ruko Niaga C6 & C7	Mastro Gym Centre	Ruko Niaga C6 & C7
Flash Gym	Jl. Danau Toba F 17-18	Flash Gym	Jl. Danau Toba F 17-18	Flash Gym	Jl. Danau Toba F 17-18
Calosa Fitness Centre	Jl. Raya Langsep 2 F	Calosa Fitness Centre	Jl. Raya Langsep 2 F	Calosa Fitness Centre	Jl. Raya Langsep 2 F
Body Gym	Jl. Bondowoso 14	Body Gym	Jl. Bondowoso 14	Body Gym	Jl. Bondowoso 14
Jumlah	12	Jumlah	12	Jumlah	12

LAMPIRAN 5 PEDOMAN DAN TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Ibu Wiwik (Kepala seksi pendataan pajak daerah Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang)

Tanggal : 13 April 2016

Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Fokus : Penetapan target pajak hiburan dan Basis data pajak hiburan

1. Siapa yang melaksanakan kegiatan terkait penentuan dan penetapan target pajak hiburan di Kota Malang?

Jawab : Kegiatan penentuan dan penetapan target pajak hiburan ya mas hmm tidak hanya pajak hiburan saja tetapi seluruh pajak daerah lainnya penetapan targetnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dan BPKAD yang sebelumnya sudah ada koordinasi dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Jadi Pemerintah Kota Malang sudah memiliki hierarki yang mengurus perhitungan penetapan target, Dinas Pendapatan Daerah hanya sebagai pelaksana saja yang dimana sebagai tugas dari SKPD kota malang, tetapi Dinas Pendapatan Daerah juga sebelumnya berkordinasi dengan pemerintah kota malang dan BPKAD untuk memberikan masukan masukan dalam penentuan dan penetapan target pajak daerah, jadi ada koordinasi dan kerjasama didalamnya sehingga nanti mencapai suatu kesepakatan yang dapat disepakati bersama dalam penentuan dan penetapan target pajak daerah di Kota Malang, Dinas Pendapatan Daerah hanya sebagai pelaksana didalam pemungutan pajak daerah

2. Apakah ada bentuk kerjasama dengan instansi lain dalam penentuan dan penetapan target pajak hiburan di Kota Malang?

Jawab : Bentuk kerjasama dalam penentuan dan penetapan target pajak hiburan dirapatkan oleh DPR dan Pemerintah Kota Malang dalam hal ini BPKAD dimana DPR dan BPKAD dalam merapatkan penentuan dan penetapan target pajak hiburan di Kota malang juga berkoordinasi dan berkerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah, dengan melihat data-data

yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang nantinya data tersebut berguna didalam perumusan penentuan dan penetapan target pajak hiburan di Kota Malang. Setelah dapat suatu kesepakatan didalam didalam perumusan penentuan dan penetapan target pajak hiburan, kemudian Dinas Pendapatan Daerah sebagai SKPD yang menjalankan untuk melakukan pemenuhan atas target yang telah di tetapkan tersebut.

3. Mekanisme penentuan dan penetapan target pajak hiburan di Kota Malang?

Jawab : Hmmmmm coba pak okky di bagian P3

4. Apa yang mejadi dasar pedoman dalam penentuan dan penetapan target pajak hiburan di Kota malang?

Jawab : Yang menjadi dasar pedoman dalam penentuan dan penetapan target pajak hiburan di Kota Malang, dilihat dari potensinya, kaitannya dengann pak Okky bagian P3

5. Apa yang menjadi tolak ukur didalam penentuan dan penetapan target pajak hiburan di kota malang?

Jawab : Tolak ukur yang dijadikan dalam penentuan dan penetapan target pajak hiburan di kota malang bisa dilihat dari potensi potensi pajak hiburan dikota malang pada setiap objeknya dan juga dari historis historis target dan realisasi penerimaan pajak di tahun sebelumnya dan dengan menggunakan beberapa kajian ekonomi dalam perumusan penentuan dan penetapan pajak hiburan di Kota Malang. Dilihat dari tingkat pengunjung, jumlah kamar, jumlah hari operasi dan lain lain.

6. Adakah tim khusus didalam penentuan dan penetapan target pajak hiburan di Kota Malang setiap tahunnya?

Jawab : Ada tim khusus dalam penentuan dan penetapan target pajak hiburan dilakukan oleh kerjasama antara DISPENDA , badan anggaran, DPKAD (BPKAD) dimana semua saling berkordinasi dalam perumsan penentuan dan penetapan target pajak hiburan, yang kemudian nanti dirapatkan untuk menjadi target pajak hiburan di Kota Malang.

7. Adakah upaya peninjauan terhadap penentuan dan penetapan target pajak hiburan? Jika ada, seperti apa?

Jawab : Upaya peninjauan penentuan dan penetapan target dilakukan dengan cara evaluasi dari penentuan dan penetapan target pajak hiburan yang dilakukan setiap bulannya, karena pencapaian target pajak hiburan dilihat setiap bulannya untuk melihat perkembangan dalam pencapaian target pajak hiburan, sehingga adanya evaluasi setiap bulannya diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pencapaian target dari pajak hiburan tersebut, upaya evaluasi yang dilakukan seperti dengan melihat pencapaian target yang telah ditetapkan setiap bulannya secara rutin dan dengan juga terjun ke lapangan untuk melihat keadaan lapangan yang sebenarnya.

8. Upaya apa yang dilakukan agar penentuan dan penetapan pajak hiburan dapat dilaksanakan secara maksimal dan merepresentasikan potensi riil dari pajak hiburan di Kota Malang?

Jawab : Upaya yang dilakukan dengan melakukan kegiatan pengukuran potensi dengan melibatkan pihak ketiga sehingga angka tersebut murni dari mereka, jika petugas dispenda yang melakukan pengukuran terkadan ada opini dimana pihak dispenda yang dibebankan target tersebut kemudian angka angka tersebut dikira tidak merepresentasikan nilai yang sebenarnya, pihak ketiga dilakukan dengan salah satu pihak swasta. Upaya-upaya yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan, kita melihat secara langsung potensi dari setiap objek pajak hiburan, dispenda memiliki tim khusus Unit Pelaksana Lapangan untuk terjun langsung ke lapangan melihat dan mengamati setiap objek pajak hiburan kemudian di data setiap objek pajak hiburan, Kita lihat perkembangan wajib pajak dan calon wajib pajak melalui pendataan , dengan terjun langsung ke lapangan kita dapat melihat potensi dari pajak hiburan di Kota Malang, kemudia juga kita melihat dari historis tahun tahun sebelumnya dalam penetapan target pajak hiburan dari angka realisasi juga kita bisa lihat bagaimana peningkatan sektor pajak hiburan sehingga dapat kita perkirakan potensi nyata dari pajak hiburan di Kota Malang, kemudian data-data tersebut kita olah dengan menggunakan kajian-kajian ekonomi didalam perhitungannya sehingga hasilnya dapat diprediksi dan menggambarkan potensi riil dari pajak hiburan di Kota Malang.

Dispenda juga bekerja sama dengan pihak konsultan, pada hal ini konsultan ekonomi untuk melihat perhitungan potensi dalam penentuan dan penetapan target pajak hiburan di Kota Malang. Dinas pendapatan daerah kota Malang juga selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan pencapaian target setiap bulannya dalam memaksimalkan penerimaan hiburan dan pajak daerah lainnya.

9. Hambatan-hambatan seperti apa yang terjadi saat penentuan dan penetapan target pajak hiburan di Kota Malang?

Jawab: Hambatan hambatan dalam penentuan dan penetapan target terkadang adanya data-data yang tidak sama antara pihak2 yang berkordinasi dalam penentuan dan penetapan target pajak hiburan di kota malang, kemudian ada perbedaan pendapat yang melibatkan pihak pihak terkait dalam rapat penentuan dan penetapan target pajak hiburan seperti dispenda dasarnya apa mereka dasarnya apa, hambatan secara eksternal tidak ditemukan karena dalam penentuan dan penetapan target pajak hiburan melibatkan skpd skpd di kota malang dan dpr.

10. Apakah selalu ada pembaharuan basis pajak dari sektor pajak hiburan? Setiap kapan dilakukan?

Jawab : Pembaharuan dilakukan setiap tahunnya, walaupun perkembangan jenis-jenis hiburan tidak terlalu banyak tetapi dinas pendapatan daerah kota malang selalu melakukan pembaharuan basis pajak dari sektor pajak hiburan, pembaruan dilakuka dengan cara mendata wajib pajak hiburan dan calon wajib pajak hiburan, pendataannya dilakukan setiap saat, ketika ada wajib pajak yang mendirikan atau mengadakan jenis2 hiburan di kota malang pihak dispenda langsung melakukan pendataan dan mengajak secara persuasive untuk para wajib pajak dan calon wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak hiburan , Pembaharuan dilakukan dengan jika yang bersifat insidentil dilakukan dengan terjun langsung langsung kelapangan dengan memantau kegiatan acara hiburan tersebut, jika hiburan tetap dilakukan dengan terjun ke lapangan setiap hari yang dilakukan oleh tim Unit Pelaksana Lapangan DISPENDA yang langsung memantau kegiatan operasi jenis-jenis hiburan tersebut. Dinas pendapatan daerah kota Malang juga selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan

pencapaian target setiap bulannya dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah.

11. Apa yang menjadi pertimbangan dalam penetapan perluasan basis pajak hiburan?

Jawab : Karena biaya pembangunan di Kota Malang yang selalu meningkat, maka dispenda harus selalu melakukan ekstensifikasi untuk memenuhi kebutuhan itu, jika ada jenis-jenis hiburan baru dinas pendapatan daerah kota malang langsung mendata mereka untuk didaftarkan menjadi wajib pajak hiburan di Kota malang, jadi sebelum mereka melaporkan diri ke Dispenda sudah ada petugas dispenda yang langsung terjun ke lapangan untuk melakukan tindakan persuasive untuk menjemput para calon wajib pajak hiburan untuk menjadi wajib pajak hiburan. Biasanya kita memberikan semacam tax holidays selama 3 bulan kepada para calon wajib pajak hiburan yang baru mendirikan usaha hiburannya, untuk masa trial, , dimana selama tiga bulan itu calon wajib pajak diberikan waktu untuk melaporkan usahanya tetapi jika dalam waktu 3 bulan itu calon wajib pajak belum melakukan kewajibannya dispenda memiliki tim pemeriksa yang langsung mendatangi calon wajib pajak tersebut kemudian juga dispenda melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat untuk mensosialisasikan kepada wajib pajak dan calon wajib pajak tentang kewajiban kewajiban seorang wajib pajak daerah

12. Bagaimana pembaharuan basis pajak dari sektor pajak hiburan dilakukan?

Jawab : Pembaharuan basis pajak dari sektor pajak hiburan dilakukan dengan cara ekstensifikasi, dilakukan dengan mencari data-data baru terkait data dari wajib pajak hiburan dan calon wajib pajak hiburan dengan cara terjun langsung kelapangan, dengan cara menilai mana saja yang termasuk objek pajak hiburan, kemudian mengundang wajib pajak dengan cara persuasif untuk melaksanakan pendaftaran dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak hiburan. Kemudian cara yang lain dilakukan adalah dengan melakukan penggalan potensi pajak hiburan baru dan melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pemeriksaan pajak. Sosialisasi yang dilakukan juga sudah terjadwal sebagai program dari dinas pendapatan daerah setiap tahunnya seperti tax go to campus, tax go to mall dll.

13. Bagaimana cara melakukan pendeteksian dan pendataan dari wajib pajak hiburan di Kota Malang?

Jawab : Selain langsung terjun langsung kelapang Pendekteksian dan pendataan dilakukan melalui kerjasama dengan bp2t Kota malang, karena mereka yang mengeluarkan izin pendiriaan usaha dan izin keramaian terkait sektor pajak hiburan. Data-data yang diperoleh dari bp2t kemudian di sinkron kan dengan data-data dari dispenda, Karena tidak semua wajib pajak itu mau mengurus izin tersebut, sehingga karena dispenda berperan memungut pajak ketika para pengusaha tersebut memungut pajak dari konsumen, maka dispenda berperan didalam pendeteksian dan pendataan wajib pajak hiburan di kota malang. Karena terkadang ada beberapa wajib pajak daerah yang tidak patuh didalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti tidak mau membayarkan pajaknya, sehingga wajib pajak daerah seperti itu harus ditindak lebih lanjut.

14. Apakah masih ada wajib pajak hiburan yang belum terdeteksi?

Jawab : Memang masih ada objek-objek pajak hiburan di Kota Malang yang belum terdeteksi oleh kami, itu merupakan hambatan bagi kami, kesulitan kami adalah karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri yang tidak mau melaksanakan dan melaporkan usahanya. Tetapi kami sudah memiliki tim khusus yaitu UPL (Unit Pelaksana Lapangan) yang terus melakukan monitoring dan checking kepada objek-objek yang belum terdeteksi dan kemudian kami undang untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak daerah

15. Apakah ada tim khusus dari dispenda dalam melakukan pendeteksian dan pendataan dari wajib pajak hiburan di Kota Malang?

Jawab: Ada, dispenda memiliki Unit Pelaksana Lapangan (UPL) disetiap objek pajak daerah, terkait pajak hiburan maka Unit Pelaksana Lapangan Pajak Hiburan, tugas mereka adalah untuk memantau, mengamati, mendeteksi dan mendata objek pajak hiburan di Kota Malang, seperti contohnya objek pajak hiburan yang bersifat insidental seperti konser musik, mereka langsung terjun langsung kelapangan untuk melakukan pemantauan, mengamati dan mendata langsung terhadap jumlah tiket yang habis terjual dalam acara

tersebut, begitu pula terhadap objek hiburan yang bersifat tetap mereka langsung terjun kelapangan untuk melihat jumlah pengunjung, waktu operasi, jumlah room, jumlah meja dll. Untuk jumlah sdm dalam unit pelaksana lapangan pajak hiburan terhitung satu tim sebanyak 15 orang.

16. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan agar kegiatan pendeteksian dan pendataan wajib pajak hiburan dapat memperoleh hasil yang maksimal?

Jawab : Secara internal dispenda membentuk Unit Pelaksana Lapangan dengan tugas yang sudah saya sebutkan tadi dan melakukan pemeriksaan pajak, karena tidak semua wajib pajak jujur, salah satunya dengan terjun langsung ke lapangan untuk menjadi patokan apakah wajib pajak hiburan ini sudah jujur melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

17. Terkait pendeteksian dan pendataan wajib pajak hiburan, adakah pihak wajib pajak yang bertindak kooperatif terkait kegiatann tersebut ?

Jawab : Ada dan pasti ada, jika ada wajib pajak yang nakal selalu kita buatkan skk (surat kuasa khusus) ke pihak kejaksaan, nanti pihak kejaksaan yang langsung menangani, contohnya seperti yang bersifat insidentil ada yang membayarkan pajaknya kurang, dan tidak mau membayar pajaknya, karena untuk yang bersifat insidentil mereka menitipkan pajaknya terkait tiket yang mereka jual, kemudian jika saat hari h tiket yang mereka jual habis dan mereka menambah tiket terkadang ada yang tidak mereka laporkan sehingga langsung dispenda tindak dengan melakukan panggilan sebanyak 3 kali jika tidak ada respon maka langsung kita serahkan ke pihak kejaksaan dan berwajib, jika terkait objek pajak hiburan yang bersifat tetap terkadang ada pihak wajib pajak yang tidak mau menandatangani berita acara saat dilakukannya pendataan ataupun pemeriksaan pajak.

18. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi secara internal dan eksternal didalam pendataan dan pendeteksian wajib pajak hiburan di Kota Malang?

Jawab : Secara eksterenal hambatan yang dihadapi seperti adanya wajib pajak yang tidak mau menemui kita, kemudian ketika melakukan peninjauan lapangan terkadang ada petugas petugas dari wajib pajak hiburan yang tidak mau tand tangan berita acara peninjauan lapangan terkait pendataan wajib

pajak hiburan. Hambatan internal yang dihadapi untuk saat ini tidak ada karena kita melakukan tugas sudah sesuai dengan sop yang sudah ditetapkan.



TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Ibu Yoni (Kepala seksi penetapan pajak daerah Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang)
Tanggal : 13 April 2016
Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
Fokus : Optimalisasi penerimaan pajak hiburan Kota Malang

1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak hiburan di Kota Malang?

Jawab : Untuk mekanisme pemungutan pajak hiburan berdasarkan perda no 2 tahun 2015, dengan cara menghimpun data objek dan subjek pajak hiburan, kemudian wajib pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak hiburan, wajib untuk melaporkan hasil usahanya atau omzet sejujur jujurnya kepada dispenda sebagai pemungut pajak hiburan, dasar pengenaan pajak hiburan adalah omzet dikalikan dengan tarif pajak hiburan yang tertera di perda no 2 tahun 2015, begitupun yang bersifat insidental, tiket penjualan harus dilaporkan kepada dispenda dengan jumlah yang sebenarnya. Omzet itu dilaporkan dengan menggunakan SPTPD dapat dilakukan dengan online dan melakukan pembayaran di bank persepsi.

2. Adakah kriteria tertentu terhadap jenis-jenis hiburan di Kota Malang yang dapat dikenakan atau dipungut pajaknya?

Jawab : Kriteria jenis-jenis hiburan yang dikenakan dan dipungut pajaknya berdasarkan jenis-jenis hiburan yang terdapat di peraturan daerah no 2 tahun 2015, segala macam jenis-jenis hiburan yang termasuk didalam perda no 2 tahun 2015 maka itu yang dikenakan pajaknya

3. Apa yang menjadi dasar pedoman pemungutan pajak hiburan di Kota Malang?

Jawab : Yang menjadi dasar pedoman didalam pemungutan pajak hiburan adalah perda no 2 tahun 2015 yang baru diberlakukan per 1 mei ini mas, sebelumnya kan perda no 16 tahun 2010 kemudian peraturan walikota dan juga uu no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

4. Bagaimana realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap target yang telah ditetapkan 3 tahun terakhir?

Jawab : Realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap target pada tahun 2013-2015 selalu melebihi target yang telah ditetapkan, agar melebihi target yang ditetapkan dispenda selalu melakukan upaya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan, sosialisasi, penggalian potensi baru dll, upaya intensifikasi dilakukan dengan pelatihan pelatihan sdm dari dispenda

5. Apakah angka realisasi tersebut sudah merepresentasikan potensi riil dari pajak hiburan di Kota Malang?

Jawab : Untuk saat ini sudah, karena pihak dispenda juga melakukan perhitungan potensi pajak hiburan melalui kegiatan pendataan yang dilakukan pihak dispenda kota malang.

6. Bagaimana proses penetapan target pajak hiburan di Kota Malang?

Jawab : Penetapan target pajak hiburan tetap di Kota Malang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. Perumusan dalam penetapan target pajak hiburan dilakukan bersama dengan BPKAD dan Dispenda. Pemerintah Kota Malang bersama BPKAD dan Dispenda bekerja sama untuk merumuskan target pajak hiburan tetap di Kota Malang. Jadi angka-angkanya yang tahu yang hanya pemerintah kota malang saja ya dispenda hanya memberikan beberapa saran. Saran yang diberikan berupa data-data yang kami berikan dari hasil pendataan dan perhitungan potensi yang telah kami hitung. Dispenda hanya diberi tugas untuk memberikan beberapa masukan dalam perumusan target pajak hiburan tetap. Dispenda juga membuat perumusan target pajak daerah versi dispenda yang nantinya juga akan dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan target pajak hiburan. Intinya Dispenda hanya menjalankan tugasnya sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah kota malang, jika pemerintah kota malang menargetkan sejumlah sekian kita harus mampu mencapainya. Supaya tidak timbul persepsi masyarakat jika penentuan target pajak ditentukan supaya Dispenda dapat secara mudah mencapai targetnya, itu salah

7. Upaya apa saja yang dilakukan pihak DISPENDA Kota Malang agar realisasi penerimaan pajak hiburan mencapai target? Jelaskan upaya-upaya tersebut

Jawab : Upaya yang dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, seperti membentuk UPL (Unit Pelaksana Lapangan), Sosialisasi, Penggalian Potensi, Pendataan, pengembang sdm dll

8. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah?

Jawab : Sistem pemungutan pajak daerah yang bersifat self assessment system terkadang dijadikan celah bagi para wajib pajak daerah untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan penerimaan pajak daerah Kota Malang, contoh misalnya ada kasus penunggakan pajak dan penyampaian pajak terutang yang sesuai. Hal-hal tersebut lah yang dapat merugikan kota Malang, toh mereka membayar pajak kan nantinya mereka juga yang merasakannya toh, ya tetapi itu lah faktanya dilapangan

9. Apa saja kendala yang dihadapi baik secara internal dan eksternal dalam pencapaian realisasi penerimaan pajak hiburan?

Jawab : Kendala yang dihadapi, lebih banyak secara eksternal, adanya wajib pajak yang tidak patuh karna pada dasarnya pemungutan pajak hiburan menggunakan sistem self assement system, adaya wajib pajak yang kurang kooperatif, contohnya seperti ada pihak eo yang melaksanakan kegiatan hiburan di malang kebetulan eo tersebut berasal dari luar malang dan setelah acara tersebut selesai eo tersebut lari dari kewajibannya sebagai wajib pajak hiburan, karena adanya tiket tambahan yg belum terkorporasi, kendala secara internal secara keseluruhan tidak ada, kerena semua sudah tahu tugas2 mereka sebagai petugas

10. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut?

Jawab : Upaya yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang kewajibannya dalam membayar pajak daerah, lebih kearah persuasive, tetapi jika ada wajib pajak daerah yang bandel dan tidak patuh kita melakukan tindakan lebih lanjut seusai dengan prosedur, seperti melakukan panggilan, pemeriksaan dan jika memang benar tidak patuh juga kita serahkan ke kejaksaan dan pihak yang berwenang karena tugas dispenda hanya memungut pajak saja.

11. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Malang?

Jawab : Pengaruh nya cukup besar dalam penerimaan pajak daerah, karena kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun penerimaan pajak daerah dari objek pajak daerah yang lain, karena dari penerimaan dari setiap objek pajak daerah memiliki peran didalam pembangunan daerah kota Malang

12. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi apa saja yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hiburan kota Malang?

Jawab : Upaya intensifikasi dilakukan dengan pengembangan dan pelatihan kepada para petugas dispenda, jika ekstensifikasi dilakukan dengan penggalan potensi pajak hiburan dengan melakukann pendataann dan terjun langsung ke lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, mengajak dan mengundang para calon wajib pajak hiburan yag belum terdata untuk mendaftar sebagai wajib pajak

13. Ada beberapa objek pajak hiburan yang tidak tercapai, mengapa hal itu bisa terjadi?

Jawab : Ya memang ada beberapa yang tidak tercapai tapi jika secara general target pajak hiburan sudah tercapai. Penetapan pajak daerah yang tidak tercapainya target pada beberapa jenis objek pajak hiburan yang bersifat tetap lebih banyak terjadi karena faktor-faktor eksternal diluar Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mas, seperti yang saya jelaskan tadi karena *self assessment system* terkadang dijadikan celah bagi para wajib pajak yang bandel seperti melakukan tunggakan pajak, melaporkan usaha yang tidak sebenarnya, enggan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kita sudah melaksanakan tugas sesuai tupoksi tetapi hal-hal karna kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak yang menjadi hambatan utama bagi kami, contoh lagi seperti wajib pajak yang hanya menunggu panggilan dari dispenda saja dalam melaksanakan kewajibannya dan jika dispenda tidak memanggil maka wajib pajak itu ya hanya santai santai saja, hal tersebut kan juga sebagai hambatan bagi kami, tindakan kurang kooperatif dari wajib pajak juga sering kami rasakan, adanya wajib pajak yang kurang terbuka saat dilakukan pendataan, pemeriksaan dan lain-lain tapi yang penting kami menjalankan tugas sesuai tupoksi aja sudah

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Pak Okky (Kepala Bidang Pengembang potensi dan pembukuan pajak daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

Tanggal : 13 April 2016

Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Fokus : Potensi pajak hiburan Kota Malang

1. Bagaimanakah perkembangan jenis-jenis hiburan di kota Malang sampai akhir tahun 2015 ini?

Jawab :Jenis hiburan di kota Malang lagi berkembang, ya kan? Ini bisa ditunjukkan dengan sering hadirnya kegiatan konser musik di kota Malang, pameran, pertandingan-pertandingan olahraga dan juga banyaknya cafe, banyaknya karaoke yang berkembang di kota Malang. Tempat rekreasi juga ada, pagelaran seni juga sering, ini relative berkembang di kota Malang.

2. Apakah di tahun 2016 ini dapat diprediksi perkembangan jenis-jenis hiburan di kota Malang? Dan bagaimana memprediksinya?

Jawab : Perkembangan jenis-jenis hiburan di Kota Malang setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi tidak pesat atau relative stagnan, perkembangan pesatnya lebih ditunjukkan pada jenis-jenis hiburan yang bersifat incidental seperti konser musik, pameran dan lain-lain. Karena hiburan di Kota Malang secara umum kami bagi menjadi dua, berdasarkan sifatnya, yaitu yang bersifat insidental dan tetap. Yang bersifat incidental ya seperti konser musik, pameran kalau yang bersifat tetap ya seperti bioskop, karaoke dan lain-lain Tetapi perkembangan ini tidak boleh dianggap remeh dan harus selalu dikelola semaksimal mungkin oleh kami, karena itu juga merupakan sumber penerimaan kota malang. Dan perkembangan jenis-jenis hiburan di Kota Malang juga kita prediksi melalui berbagai kajian dan melihat secara historis dari tahun-tahun sebelumnya, hal itu dilakukan agar kami dapat melihat seberapa besar potensi pajak hiburan yang terdapat di Kota malang

3. Apakah pihak Dispenda kota Malang ikut serta dalam meningkatkan perkembangan jenis-jenis hiburan di kota Malang?

Jawab : Tentunya, sesuai dengan tupoksi, kita bekerja sama dengan SKPD yang lain. Seperti Dinas Pariwisata, karena kalau ada moment-moment seperti itu, event-event seperti itu, kita berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, misalnya dari segi perizinan, kita juga bekerja sama dengan BP2T, ini ada konser musik, perizinannya seperti apa, biar diurus. Kita lebih fokus pada penerimaan pajaknya, tapi dengan adanya penerimaan pajak tapi tidak hanya semerta-merta pajaknya, bagaimana konser musik yang diadakan bisa menarik wisatawan di kota Malang. Intinya seperti itu dengan SKPD terkait.

4. Jenis-jenis hiburan apa saja pak yang paling berpotensi dalam penerimaan pajak hiburan?

Jawab : Kalo hiburan di Kota Malang lebih banyak pada di bioskop, itu yang paling besar sebenarnya, karaoke, karaoke pajak nomor dua lah untuk pajak hiburan, relatif, di bawah satu miliar lah rata-rata. Dua itu yang tinggi, target yang ditetapkan paling tinggi, itu.

5. Jika dibandingkan dengan pajak daerah lain, pak, bagaimana penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pajak hiburan di kota Malang, pak?

Jawab: Pajak hiburan kita itu, tahun ini ditargetkan hanya sebesar 5,5. Iya, secara keseluruhan itu 282. Berarti kecil. Tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan kota Malang, kota pariwisata, ya mungkin bisa meningkat. Minimal karaoke, banyak mahasiswa-mahasiswa yang sering, berekreasi. Karena malang dengan kota pendidikannya, kota pariwisata dan kota industry sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan

6. Bagaimana Perkembangan penerimaan pajak hiburan di kota Malang sampai akhir tahun 2015?

Jawab: Selama ini relatif pasti tercapai.

7. Upaya-upaya apa yang dilakukan Dispenda agar realisasi penerimaan hiburan pajak daerah tercapai secara maksimal?

Jawab : Upaya yang dilakukan Dispenda dalam memaksimalkan penerimaan pajak hiburan dan pajak daerah lain itu dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi, intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan kinerja pegawai dispenda melalui pelatihan-pelatihan, memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam administrasi perpajakannya seperti pajak online, membayar lewat smartphone, mendirikan loket pembayaran pajak di pusat perbelanjaan memberikan sosialisasi edukatif kepada seluruh lapisan masyarakat contohnya seperti tax goes to campus, tax goes to school, tax goes to mall, kalau ekstensifikasi kita lakukan dengan cara memberikan sosialisasi edukatif kepada seluruh lapisan masyarakat contohnya seperti tax goes to campus, tax goes to school, tax goes to mall yang paling ekstrem yaitu kita terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan kemudian kita juga melakukan monitoring dan checking pada setiap penyelenggaraan hiburan di Kota Malang”

8. Bagaimana upayanya jika terhadap pajak hiburan di Kota Malang?

Jawab : Pada dasarnya sama upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam mencapai target penerimaan pajak daerah maupun pajak hiburan, upaya intensifikasi dilakukan dengan pengembangan pelatihan pegawai secara mental dan teknis seperti bekerja sama dengan TNI, memberikan kemudahan-kemudahan kepada wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajibannya seperti adanya pajak online, melakukan evaluasi dan monitoring terkait pencapaian pajak hiburan setiap bulannya semua itu termasuk kedalam peningkatan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan, upaya ekstensifikasi yang kami lakukan seperti melakukan dan meningkatkan kegiatan sosialisasi pendataan langsung dengan terjun langsung kelapangan, melakukan monitoring dan checking yang dilakukan oleh ada namanya UPL yaitu Unit Pelaksana Lapangan, pengkajian terhadap peraturan daerah juga termasuk mas.

9. Apakah pajak hiburan berpotensi di dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kota Malang?

Jawab : Secara keseluruhan nilainya kecil ya pajak hiburan, tetapi kita tidak boleh lepas bahwa hiburan itu berdampak kepada yang lain, tetap kita pelihara. Nilainya kecil pajak hiburan di kota Malang karena ada sinergi, kalau bicara pajak hiburan kan nanti berarti dia bergerak juga di bidang makannya ada, hotel ada. Seperti itu, jadi kita tidak boleh mengenyampingkan satu jenis pajak. Tetap semua kita pelihara, kita tata, walaupun targetnya kecil.

10. Siapakah yang melakukan kegiatan terkait penetapan pajak hiburan di kota Malang?

Jawab: Tentunya dari semua bidang di Dispenda bekerja sama bekerjasama kemudian dilakukan perumusan bersama dengan Pemerintah Kota Malang dan BPKAD. Nah atas dasar tahun-tahun yang lalu seperti apa. Tahun lalu sekian, terus ke depan kita melihat dari segi perekonomian kota Malang tahun ini berapa, tahun depannya tentu bisa diprediksi ada peningkatan. Nah tentu targetnya bisa kita tingkatan, atau diturunkan. Manakala terjadi kondisi perekonomian yang rendah. Kalo ekonominya bagus ya kita naikkan. Seperti itu.

11. : Mekanisme penentuan dan penetapan target pajak hiburan di kota Malang seperti apa?

Jawab : Ya penetapannya pada saat menentukan target dari historis ya, kemaren kita mencapai, kita naikkan dari atas dasar kajian itu tadi

12. Apa yang menjadi dasar pedoman dalam penentuan dan penetapan target pajak hiburan di kota Malang?

Jawab : Pedomannya dari kajian. Tapi kalo kita bisa melihat kegiatan kita di lapangan, ya kita bisa melihat salah satu contohnya, hiburan, karaoke, berapa room sih di situ, berapa sih kunjungannya? Berapa sih tarifnya? Dari suatu karaoke bisa kelihatan. Berapa karaoke di kota Malang, dan kita nongkrong-nongkrong semua.

13. Upaya apa yang dilakukan agar penentuan dan penetapan target pajak hiburan itu dapat dilakukan secara maksimal ?

Jawab : Kita meningkatkan SDM, dikali keterampilan-keterampilan, terkait terkait pengumpulan pajak yang benar. Dikali mekanisme-mekanisme, memahami mekanismenya seperti apa. Terus bagaimana meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam pajak hiburan. Bahwa bukan hanya kewajiban, tapi kesadaran. Jadi tanpa harus ditekan mereka sudah sadar dan membayar pajak sendiri. Kesadaran Wajib Pajak sangat penting sekali untuk meningkatkan.

14. Apa tujuan dilaksanakannya perhitungan potensi pajak hiburan di kota Malang ?

Jawab : Intinya ya kita kan prinsip pajak, adil, prinsip keadilan. Kalau memang harusnya dengan aturan bayar pajaknya sekian. Ya mereka juga harus membayar sesuai dengan kenyataannya. Karena kita lihat data potensi. Semuanya tetap, padahal kenaikan sekian persen, kan tidak adil. Masyarakat yang dirugikan. Pajak kan untuk masyarakat juga. Kalau ada suatu usaha yang hiburannya rame, tapi pajaknya rendah, berarti kan tidak adil kan. Masyarakat yang merasa dirugikan, karena merasa kurang. Karena kan dananya kembali ke masyarakat untuk pembangunan.

15. Yang menjadi tolak ukur dalam penetapan target pajak hiburan itu apa pak?

Jawab: Dalam perumusan dan penetapan target yang pemerintah kota malang, BPKAD dan Dispenda mengacu pada pendataan serta perhitungan potensi yang telah dilakukan serta melihat target dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, selain itu kajian-kajian ekonomi juga berperan dalam perumusan dan penetapan target yang kami tetapkan tujuannya agar dapat memperoleh target yang nyata dari potensi pajak hiburan di Kota Malang

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Hendrawan (staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Malang)

Tanggal : 13 April 2016

Lokasi : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang

1. Jika setelah saya lihat jumlah jenis-jenis hiburan di Kota Malang tiap tahunnya mengalami peningkatan ya mas?

Jawab : Iya, seperti di data itu bisa dilihat sendiri setiap tahunnya meningkat hehe

2. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan jenis-jenis hiburan di Kota Malang apa mas?

Jawab : Ya walaupun peningkatan jenis-jenis hiburan di kota Malang tidak meningkat secara tajam dari tahun ke tahun, tetapi setiap tahunnya jenis-jenis hiburan di Kota Malang selalu mengalami peningkatan. Fenomena itu bisa terjadi tidak bisa terlepas dari TriBina Cita Kota Malang, yaitu cita-cita Kota Malang sebagai kota Pariwisata, Industri dan Pendidikan. Secara tidak langsung ataupun langsung dapat meningkatkan pertumbuhan jenis-jenis hiburan di Kota Malang bisa dilihat dari kebutuhan para mahasiswa mungkin atau masyarakat di seluruh Kota Malang terhadap hiburan yang semakin meningkat tiap tahunnya. Sehingga ada stimulus bagi investor atau pengusaha untuk mendirikan tempat-tempat hiburan

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Bu Wiwiek (Kepala Bidang Pengembang potensi dan pembukuan pajak daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

Tanggal : 21 Juni 2016

Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

1. Jika saya melihat laporan target dan realisasi, saya ingin konfirmasi apakah memang benar pajak atas tempat fitness tidak dipungut?

Jawab : Iya benar mas

2. Mengapa tidak dipungut bu? Padahal di perda diatur ketentuannya

Jawab : Untuk pemungutan pajak hiburan atas tempat fitness memang sekarang tidak kami pungut mas, sempat dulu kami melakukan pemungutan atas itu namun karena potensi penerimaannya sangat kecil jadi tidak kami pungut lagi. Memang di perda ada aturannya untuk itu tapi gimana ya mas, kalau dibilang salah ya memang salah namun terkadang kami bekerja harus memakai hati nurani. Namun kita sudah melakukan pertimbangan dan perhitungan-perhitungan sebelum kami tidak memberlakukan pemungutan pajak atas tempat fitness di Kota Malang dan telah melalui persetujuan dari pemerintah kota Malang sehingga pemungutan atas pajak tempat fitness tidak kami pungut. Pemerintah kota malang juga melakukan pertimbangan-pertimbangan juga pastinya dalam hal ini pak walikota terkait pajak tempat fitness namun kan pada realisasinya penerimaan pajak hiburan selalu melebihi target yang ditetapkan

LAMPIRAN 6 SURAT PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
 Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
 Malang 65132

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 072/ 736 /35.73.313/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NI KADEK YULIE DIAN SARI, SE, MM
 NIP : 19740724 200112 2 003
 Jabatan : Kasubag Umum
 Instansi : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
 Alamat : Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai I
 Telp/Fax : (0341) 751532

Menerangkan bahwa :

NAMA : RAHMAT AJI ALDIANSYAH
 NIM : 125030400111066
 Program Study : PERPAJAKAN
 Universitas : BRAWIJAYA Malang

Telah melaksanakan Penelitian / Survey / Research pada Dinas
 Pendapatan Daerah Kota Malang pada bulan APRIL 2016

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai
 kelengkapan Program Study yang bersangkutan.

Malang , 10 MAY 2016

a.n.KEPALA DINAS PENDAPATAN
 DAERAH KOTA MALANG

Sekretaris
 U.b.Kasubag Umum

NI KADEK YULIE DIAN SARI, SE, MM
 Pejabat Tingkat I
 NIP. 19740724 200112 2 003

LAMPIRAN 7 CURRICULUM VITAE

Nama : Rahmat Aji Aldiansyah
NIM : 125030400111066
Tempat dan Tanggal Lahir : Tulung Agung, 19 Juni 1994
Alamat : Komp. Ciledug Indah 2 Blok E 24 No. 33, Tangerang
Banten
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tinggi/ Berat Badan : 179cm/70kg
Agama : Islam
Email : ajialdiansyah@yahoo.com
Pendidikan Formal : SD Islam Al-Hasanah 2000-2006
SMP Negeri 3 Tangerang 2006-2009
SMA Negeri 63 Jakarta 2009-2012
Universitas Brawijaya 2012
Karya Ilmiah : Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hiburan dalam Upaya
Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang)

